



REVISI PERDA BERLAKU TAHUN DEPAN Tinggi, Kepatuhan Warga Bayar PBB

YOGYA (KR) - Tingkat kepatuhan warga terutama wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya dalam membayarkan kewajibannya dinilai cukup tinggi. Meski dibayangi kenaikan PBB pada awal tahun 2020 serta adanya pandemi Covid-19 namun realisasinya tergolong signifikan.

Ketua Pansus Revisi Perda PBB DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, menyebut hingga akhir pekan ketiga Oktober terdapat 69.796 WP yang sudah membayarkan PBB. "Total nilai yang masuk ke kas daerah mencapai Rp 83,1 miliar yang berasal dari 73,25 persen wajib pajak. Bagi kami itu sangat tinggi dengan melihat kondisi sosial ekonomi saat ini," tandasnya, Kamis (29/10).

Dirinya pun mengapresiasi kepatuhan wajib pajak PBB yang memiliki kepedulian dalam keberlanjutan pembangunan di Kota Yogya. Pasalnya, realisasi PBB tersebut saat ini memasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi. Padahal biasanya PAD tertinggi disumbang dari pajak hotel, namun selama masa pandemi sektor itu terdampak signifikan.

Apresiasi juga diberikan kepada unsur Pemkot Yogya terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah bekerja keras un-

tuk memberikan kemudahan dan keringanan masyarakat dalam optimalisasi PBB. Revisi Perda PBB yang kini tengah dibahas di dewan pun kelak akan kembali memberikan keringanan wajib pajak atas kewajiban yang harus ditunaikan. "Bagi kami realisasi PBB tahun ini di luar dugaan. Meski di awal tahun ada polemik kenaikan tarif PBB dan sekarang ditambah pandemi Covid-19, tetapi kepatuhannya tinggi," imbuhnya.

Terkait revisi Perda PBB, menurut Nurcahyo, akan diberlakukan pada tahun 2021. Materi krusial yang dijadikan pembahasan ialah koefisien Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga akan berpengaruh terhadap tarif PBB. Latar belakang munculnya revisi perda tersebut tak lain karena penyesuaian NJOP tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pembayaran PBB. Hal itu pun menimbulkan keberatan wajib pajak di beberapa wilayah di Kota Yogya sehingga perlu adanya peninjauan tarif.

"Ini merupakan perubahan kedua atas Perda 2/2011. Saat ini pembahasan sudah hampir selesai agar ke depan masyarakat tidak terlalu terbebani. Meski ada penyesuaian NJOP namun kenaikan tarifnya masih dalam kondisi wajar," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005